



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENJA TAHUN 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin No. Telp./Fax
e_mail: satpolpp.kab.tanjab.barat@gmail.com
KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat yang menjabarkan lebih rinci lagi mengenai program, kegiatan dan target capaian masing – masing sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjadi acuan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

Demikian, semoga bermanfaat dan atas kerjasama dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal ,

2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dalam penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan serta kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 No 48, Tambahan Lembaran Negara No 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program, kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung dengan dukungan adanya pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2023 dengan harapan dapat mendorong partisipasi dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan berdasarkan masalah-masalah yang sedang di hadapi melalui kegiatan untuk keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai mana Renstra Orisinil yang telah ditetapkan. Sejalan dengan Visi Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) ”.**

Maka **Visi Satuan Polisi Pamong Praja** adalah “**Terwujudnya Penegakan Regulasi Daerah yang Berkeadilan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat**”.

Dan dalam rangka mewujudkan Visi dimaksud diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan adalah **Misi Satuan Polisi Pamong Praja** sebagai berikut :

1. Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan Masyarakat.

2. Tugas Pokok

Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksaaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dalam hal pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun yaitu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, adalah :

1. Mendiskripsikan serta merencanakan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat;
2. Program – program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan untuk diperkenankan pengajuan dengan menitik beratkan pada program dan kegiatan serta subkegiatan;
3. Untuk dijadikan sebagai Rancangan penyusunan RKPD Kab.Tanjung Jabung Barat tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100%	12
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP	A	C	B	-	-	B	-	-	
01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terbitnya Lakip SKPD	60	C	B	-	-	BB	-	-
01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	60	97 %	100 %	35%	35	100 %		
01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	60	97 %	100 %	25%	25	100 %		
01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	92,99 %	100 %	20%	20	100 %		
01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	90,66 %	100 %	35%	35	100 %		

01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	92,99 %	100 %	25%	25	100 %			
01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	60	90,66 %	100 %	35%	35	100 %			
02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	180 %								
02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	60	99,48 %	100 %	35%	35	100 %			
02	2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	60	100 %	100 %	20 %	20	100 %			
02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Aktif	60	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa tugas-tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja Per-Bidang dan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja Per-Bidang tersebut terdiri dari Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator *)	SPM (Permen dagri 121 2018)	IKK (Perme n dagri 18 2020)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyek si		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pengawasan dan Penegakan Pelanggaran Perda	100%	90 %	85 %	85 %	90 %	90 %	80 %	80 %	95 %	100 %	
2	Penurunan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100%	90 %	85 %	85 %	90 %	90 %	80 %	80 %	95 %	100 %	
3	Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi	100%	75 %	70 %	75 %	70 %	75 %	80 %	80 %	94 %	100 %	
4	Jumlah Penanganan Demo Tanpa Anarkis	100%	80 %	90 %	90 %	85 %	80 %	80 %	80 %	95 %	100 %	
5	Tingkat Penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman di Kabupaten	100%	85 %	85 %	90 %	90 %	85 %	80 %	80 %	100%	100%	
6	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	100%	100 %	90 %	90 %	85 %	100 %	85 %	85 %	95 %	100 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seiring dengan meningkatnya perkembangan Kab. Tanjung Jabung Barat maka semakin perlu ditingkatkan usaha dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal ini disebabkan semakin tingginya kepentingan masyarakat dalam memenuhi hajat hidup yang mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak disadari bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beberapa hal yang menjadi pokok perhatian dan diperlukan analisa yang mendalam dari aparat Polisi Pamong Praja dalam menyikapi isu-isu yang terus bergerak di Kab. Tanjung Jabung Barat dan menjadi perhatian serius antara lain:

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
2. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan;
4. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana;
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga kenyamanan dan ketentraman sering terjadi;
6. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar;
7. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental;
8. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RENSTRA dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan

pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Rancangan Renja Renstra. Review terhadap rancangan renja Renstra dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Renja RENSTRA Tahun 2021-2026

Kode	RANWAL RENSTRA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SATPOL PP					15.015.242.896	SATPOL PP				15.132.791.136
01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Predikat SAKIP	B	9.429.055.340	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Predikat SAKIP	B	9.494.603.581
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.021.578	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.521.578
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbitnya Lakip SKPD	7 Dokumen	7.021.578	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Terbitnya Lakip dan Laporan Keuangan SKPD	12 Laporan	8.521.578
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			95 %	5.119.535.410	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			95 %	5.119.535.410
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	100 %	4.985.588.410	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	36 Orang/Bln	4.985.588.410
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	100 %	133.947.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	1 Dokument	133.947.000
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			95 %	759.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				776.000.000

RENJA SATPOL PP Kab.Tanjab Barat 2023

01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	1 Pkt	726.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	1 Paket	726.000.000
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan PNS	2 Keg	33.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan PNS	3 Orang	50.000.000
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			95 %	286.117.128	Administrasi Umum Perangkat Daerah				321.165.368
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Terpenuhiya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	3.009.643	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Terpenuhiya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	4.009.643
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan/ Bahan Pembersih	12 Bln	44.166.436	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan/ Bahan Pembersih	2 Paket	46.166.436
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersediannya makanan dan minuman rapat	12 Bln	46.796.750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersediannya makanan dan minuman rapat	1 Paket	46.796.750
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersediannya Kebutuhan Barang Cetak dan Perkantoran	12 Bln	14.932.539	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersediannya Kebutuhan Barang Cetak dan Perkantoran	2 Paket	15.932.539

05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	7.260.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokument	8.260.000
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tajab Barat, Dalam Provinsi dan Luar Prov.	Terpenuhinya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bln	169.951.760	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tajab Barat, Dalam Provinsi dan Luar Prov.	Terpenuhinya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2 Laporan	200.000.000
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90 %	2.552.836.098	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.999.856.098
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satuan Polisi Pamong Praja	5	5 Unit	269.500.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan	5 Unit	269.500.000
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Unit	990.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Unit	990.000.000
03	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Perlengkapan Ruang Kantor	1 Pkt	11.000.000	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Perlengkapan Ruang Kantor	4 Unit	20.000.000
04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	1 Pkt	70.356.098	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	70.356.098

05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kanto	1 Pkt	1.211.980.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kanto	1 Unit	1.650.000.000
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95 %	66.900.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.900.900
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Kegiatan administarsi Surat Menyurat	12 Bln	3.012.900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Kegiatan administarsi Surat Menyurat	2 Laporan	3.012.900
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bln	23.232.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 Laporan	20.232.000
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bln	40.656.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Tersedianya Jasa Administrasi dan Pelayanan Umum	6 Laporan	40.656.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90 %	199.624.227	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK		205.624.227
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	11 Unit	99.970.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	12 Unit	100.970.200

02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	3 Unit	53.631.677	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	3 Unit	53.631.677
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Peralatan Dalam Kondisi baik	100 %	5.178.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Peralatan Dalam Kondisi baik	12 Unit	10.178.800
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Gedung Dalam Kondisi baik	1 Pkt	40.843.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Gedung Dalam Kondisi baik	1 Unit	40.843.550
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	100 %	5.586.187.554	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	20 %	5.638.187.555
2.02	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penanganan gangguan trantibum	100 %	5.322.187.554	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penanganan gangguan trantibum	13 Kec	5.374.187.555
01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Tanjab Barat, 13 Kecamatan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100%	4.903.050.366	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Tanjab Barat, 13 Kecamatan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	70 Kasus	4.953.050.366

02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kabupaten Tajab Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Kasus	59.400.000	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kabupaten Tajab Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	28 Kasus	59.400.000
03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tajab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.237.188	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tajab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.237.189
04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Tajab Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	88.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	88.000.000
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	88.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	44 Orang	88.000.000

RENJA SATPOL PP Kab.Tajab Barat 2023

	Asasi Manusia									
06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Tajab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	110.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	110.000.000
07	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	16.500.000	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	16.500.000
08	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Kabupaten Tajab Barat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	16.500.000	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	16.500.000
09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Tajab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	27.500.000	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	27.500.000
2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			100 %	187.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda	187.000.000
01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabupaten Tajab Barat, Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompo	1 Laporan	44.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	1 Laporan	44.000.000

RENJA SATPOL PP Kab.Tanjab Barat 2023

		an	k Masyarakat/Pelaku Usaha					kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha		
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Tanjab Barat, di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	55.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	55.000.000
03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Tanjab Barat, di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	88.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	88.000.000
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			100 %	77.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kapasitas PPNS	1 Laporan	77.000.000
01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Luar Kabupaten, Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta	1 Laporan	77.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta	1 Laporan	77.000.000

			Penegakan Perda dan Perkada					Penegakan Perda dan Perkada		
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 belum terdapat dalam usulan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode satu Tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen sub kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, karena memuat seluruh arah kebijakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik dan merupakan kegiatan wajib;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja ;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan tersebut di sinkronkan dengan Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.
2. Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum serta Penegakan Perda dan Perkada.

Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun berjalan berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong dalam rangka terealisasinya suatu program dan kegiatan, dengan sasaran dan indikator dari sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
2. Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja (Tahun)	
				2022	2023
1.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	80%	83%
2.	Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas TRANTIBUM, Penegakan Perda dan Perkada.	Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.	Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja	80%	80%

3.2. Program dan Kegiatan**1. Program**

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan bagian sekretariat;
- b. Memperhatikan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya Visi dan Misi.

Program dimaksud oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disusun sebagai berikut :

a. Program Kerja Lima Tahun :

Program kerja lima tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut :

- Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup.
- Meningkatnya peran Masyarakat dalam melaksanakan Siskamling.
- Giat melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada anggota satuan Polisi Pamong Praja.
- Meningkatnya peran anggota Satpol PP dalam memberi pelayanan dan Trantib.

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dengan pembiayaan mengacu kepada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait, baik pihak keamanan, tokoh masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah

b. Program Kerja Tahunan :

- a. Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengadakan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyempurnaan rekrutmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pria/wanita;
- c. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang beroreantasi kepada kinerja;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan, ketata usahaan dan pelayanan kesejahteraan pegawai;
- e. Pembinaan dan penyuluhan tramtib masyarakat;
- f. Peningkatan kelancaran pelayanan proses rekomendasi pemberian perijinan;
- g. Peningkatan Operasi Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran PERDA serta Operasi Nonyustisi bersama PPNS dan instansi terkait;
- h. Peningkatan kesamaptaan petugas keamanan dalam dan petugas pengawalan pimpinan;
- i. Penertiban pelaksanaan apel pagi PNS dilingkungan kantor Bupati maupun dilapangan;
- j. Peningkatan pemeriksaan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar PERDA;
- k. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait [Polisi Militer/ Korwas Polri/ Kejaksaan/ Pengadilan tipiring, Polisi Hutan, Polisi PJKA dll];
- l. Penyempurnaan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
- m. Peningkatan penunjang sarana kerja dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan atau belanja Modal;

- n. Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- o. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.	Pengadaan Mebel
d.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	a.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
	b.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
	c.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota
	d.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	e.	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	f.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	g.	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	h.	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat
	i.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada
	2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
	a.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
	b.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota
	c.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	a.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif SKPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2024								
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8.991.035.341				9.890.138.874			
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											7.021.578			7.723.736
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbitnya Lakip dan Laporan Keuangan SKPD	Satpol PP	7 Dokumen	7.021.578	APBD KAB	7 Dokumen	7.723.736							
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5.119.535.410			5.631.488.951
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Satpol PP	100 %	4.985.588.410	APBD KAB	100 %	5.484.147.251							

RENJA SATPOL PP Kab.Tanjab Barat 2023

				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	Satpol PP	100 %	133.947.000	APBD KAB	100 %	147.341.700
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				759.000.000			834.900.000
				02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Satpol PP	1 paket	726.000.000	APBD KAB	1 paket	798.600.000
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan PNS	Satpol PP	2 kegiatan	33.000.000	APBD KAB	2 kegiatan	36.300.000
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.117.128			314.728.839
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Satpol PP	100%	3.009.643	APBD KAB	100%	3.310.607
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan	Satpol PP	12 bulan	44.166.436	APBD KAB	12 bulan	48.583.079
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya makanan dan minuman rapat	Satpol PP	12 bulan	46.796.750	APBD KAB	12 bulan	51.476.425

				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Kebutuhan Barang Cetak dan Perkantoran	Satpol PP	12 bulan	14.932.539	APBD KAB	12 bulan	16.425.792
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Satpol PP	12 bulan	7.260.000	APBD KAB	12 bulan	7.986.000
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dalam Kabupaten dan Luar Prov.	12 bulan	169.951.760	APBD KAB	12 bulan	186.946.936
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.552.836.098			2.808.119.708
				01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan	Satpol PP	5 Unit	269.500.000	APBD KAB	5 Unit	296.450.000
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Satpol PP	2 Unit	990.000.000	APBD KAB	2 Unit	1.089.000.000
				05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Ruang Kantor	Satpol PP	1 paket	11.000.000	APBD KAB	1 paket	12.100.000
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung	Satpol PP	1 paket	70.356.098	APBD KAB	1 paket	77.391.708

RENJA SATPOL PP Kab.Tanjab Barat 2023

				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Satpol PP	11 Unit	99.970.200	APBD KAB	11 Unit	109.967.220
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Satpol PP	3 unit	53.631.677	APBD KAB	3 unit	58.994.845
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Dalam Kondisi baik	Satpol PP	100%	5.178.800	APBD KAB	100%	5.696.680
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Dalam Kondisi baik	Satpol PP	1 paket	40.843.550	APBD KAB	1 paket	44.927.905
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.586.187.554			6.144.806.311
1	05	02	2.01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.322.187.554			5.854.406.311

				01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Tanjab Barat, 13 Kecamatan	100%	4.903.050.366	APBD KAB	100%	5.393.355.403
				02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Tanjab Barat, Dalam Kabupaten	10 Kasus	59.400.000	APBD KAB	10 Kasus	65.340.000
				03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum	Kab. Tanjab Barat, 3 Kecamatan	1 Dokumen	13.237.188	APBD KAB	1 Dokumen	14.560.908

					Kabupaten /Kota	dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						
				04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tanjab Barat, 13 Kecamatan	1 Dokumen	88.000.000	APBD KAB	1 Dokumen	96.800.000
				05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP	30 Orang	88.000.000	APBD KAB	30 Orang	96.800.000
				06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	1 Dokumen	110.000.000	APBD KAB	1 Dokumen	121.000.000
				07	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan	Satpol PP	1 Unit	16.500.000	APBD KAB	1 Unit	18.150.000

RENJA SATPOL PP Kab.Tanjab Barat 2023

					Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketertiban Umum yang Tersedia						
				08	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP	1 Dokumen	16.500.000	APBD KAB	1 Dokumen	18.150.000
				09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	27.500.000	APBD KAB	1 Laporan	30.250.000
1	05	02	2.02		Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				187.000.000			205.700.000
				01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kab. Tanjab Barat, di Kecamatan	1 Laporan	44.000.000	APBD KAB	1 Laporan	48.400.000
				02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	Kab. Tanjab	1 Laporan	55.000.000	APBD KAB	1 Laporan	60.500.000

RENJA SATPOL PP Kab.Tanjab Barat 2023

					pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Barat, di Kecamatan					
				03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Tanjab Barat, di Kecamatan	1 Laporan	88.000.000	APBD KAB	1 Laporan	96.800.000
1	05	02	2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				77.000.000			84.700.000
				01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta	Luar Provinsi	1 Laporan	77.000.000	APBD KAB	1 Laporan	84.700.000

						Penegakan Perda dan Perkada							
JUMLAH									14.577.222.895				16.034.945.185

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023. Selanjutnya Rencana Kerja ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program - program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat dan Kepala SKPD mengevaluasi program - program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan.

Kuala Tungkal ,

2022


Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

